

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga ADD tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Demikian untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Hal ini didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia *Aksi-Corruption Forum* (IACF 2010) yang menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, di sisi lain pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di desa masing-masing.

Sistem pengendalian internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem pengendalian internal yaitu proses setiap dimana tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pemimpin atau seluruh pegawai akan memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik. Keamanan *asset* negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60, 2008 Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa

diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sistem pengendalian internal, kompetensi juga sangat berperan dalam akuntabilitas. Menurut Indrianasari (2017) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Sebagai informasi, data yang diperoleh dari (*Tribunlutra.com,masamba*) anggaran untuk 166 desa di Kabupaten [Luwu Utara](#) pada tahun 2019 sebesar Rp.247,9 milyar. Sama halnya dengan kabupaten lainnya masing-masing diberikan anggaran tiap tahunnya, secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sehingga pemerintah desa dengan mudahnya melakukan tindakan penyalahgunaan dana desa. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang termasuk penyalahgunaan Dana Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Terdapat 5

titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa seperti pada kasus yang dimuat pada (*Tribunlutra.com* 2019) pada tanggal 5 september 2019, kepala desa Takkalala yang berada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2017. Penetapan tersangka, disampaikan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara Iptu Samsul Rijal. Iptu Samsul Rijal menyebutkan, dari audit yang dilakukan Inspektorat Luwu Utara, diketahui bahwa kerugian Negara dalam pengelolaan dana desa Takkalala sebesar 200 juta. Kasus tersebut dapat ditelaah bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal dalam mengelola dana tersebut.

Abdi (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Yesinia *et al* (2018), Rosyidi (2018), Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abubakar *et al.*, (2017) yang

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelolah alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian sudah selesai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
2. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa.
4. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1.5 Ruang Lingkup dan Instrumen Penelitian

Berdasarkan penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan menyimpang dalam penelitian sehingga lebih bisa terfokus untuk dilakukan. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian adalah yaitu Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Variabel dalam penelitian ini yaitu kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas desa dalam mengelola alokasi dana desa. kompetensi auditor adalah kemampuan atau karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik dalam hal ini yakni kemampuan untuk mengelola dana desa. Sistem pengendalian internal adalah proses yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas perusahaan demi tercapainya kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal yang dimaksud ialah bagaimana pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

2.2 Kompetensi

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Indrianasari (2017) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Menurut Widyatama dan Novita (2017) Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia.

Dewi dan Gayatri (2019) Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Adapun jenis-jenis kompetensi adalah sebagai berikut:

A. Kompetensi individu

Kompetensi individu adalah kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam upaya pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

B. Kompetensi Organisasi

Tidak dapat dipungkiri dan diragukan lagi bahwa salah satu faktor yang paling penting dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keunggulan bersaing (*competitiveadvantage*) suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan seksama dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis, menyatu dan selalu terhubung, sesuai tujuan dan ke visi misi organisasi.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan“. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2011).

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah: untuk memberikenyakinan yang memadai tentang: kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset

negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Internal

2.4 Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelolah alokasi dana desa (ADD) dalam penelitian ini adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan melalui musyawarah desa dan mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada seluruh pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil dari Penelitian
1	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	Variabel Bebas: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Variabel terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota.	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa
2	Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi	Variabel Bebas : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

		Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)	Teknologi Informasi Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di KabupatenBan tul.	
3	Hafiz <i>et al.</i> (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil Penelitian Menemukan Bahwa Secara Parsial Simultan Atau Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah, Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan, Dan Anggaran Kejelasan Tujuan Dan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Moderat Variabel Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah.
4	Rosyidi (2018)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem	Variabel bebas: Transparansi, Kompetensi	Transparansi, Kompetensi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh

		Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Dan Sistem Pengendalian Internal Variabel terikat: Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5	Widyatama dan Novita (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (di Kabupaten Sigi).	Variabel bebas: Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Variabel terikat: Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (di Kabupaten Sigi).	Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dana desa. Sistem Pengendalian Aparatur mempengaruhi Akuntabilitas alokasi Dana Desa (ADD)
6	Mada, et al., (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.	Variabel bebas: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat. Variabel terikat: Pengelolaan Dana Desa Di	Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa dan Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas

			Kabupaten Gorontalo	
7	Setiana dan Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel bebas: Pemahaman dan Peran Perangkat Variabel terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh dan Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8	Riandani (2017)	Pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitas laporan keuangan	Variabel bebas: kompetensi SDM, pemanfaatan Informasi, dan pengendalian intern teknologi Variabel terikat: Akuntabilitas laporan keuangan	Kompetensi SDM, berpengaruh positif sedangkan Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
9	Komarasari (2017)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Variabel bebas: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Variabel terikat: Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah
10	Mudrosatun, Niken Indah	Faktor-Faktor Yang	Variabel bebas:	Sumber daya aparatur dan Transparasi

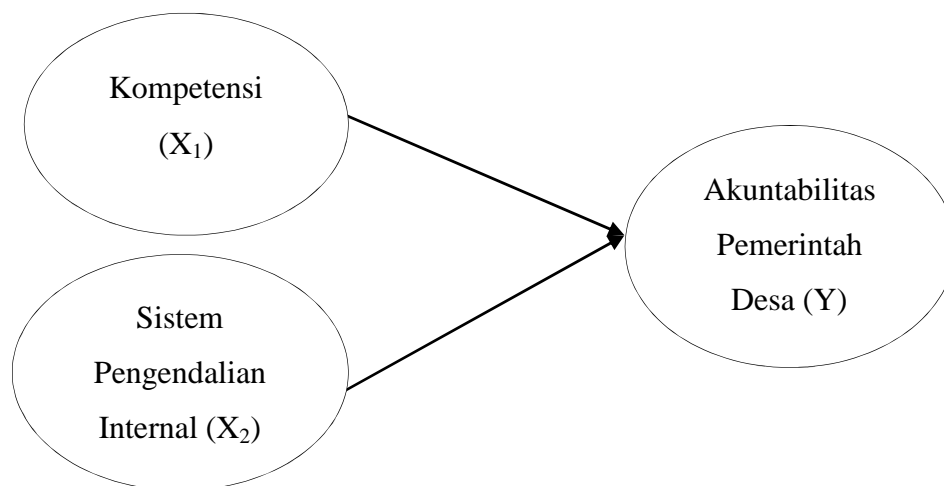
	(2017)	Mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo	Sumber daya aparatur, Trans parasi, Partisipasi Masyarakat Variabel terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	berpengaruh positifsedangkan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
11	Renggo.B (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Variabel bebas: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Variabel terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Sedangkan Secara silmultan variabel independen sama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pengelolaan dana desa.
12	Rita Martini, Naufal Lianto (2019)	Sistem pengendalian intern pemerintah atas Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan sembawa	Variabel bebas: Sistem pengendalian intern pemerintah Variabel terikat: Akuntabilitas pengelolaan	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan sembawa

			keuangan dana desa di Kecamatan sembawa	
13	Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, (2017)	Sistem pengendalian intern pemerintah atas Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa	Variabel bebas: Sistem pengendalian intern pemerintah Variabel terikat: Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa
14	Yudianto (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel bebas: Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Variabel terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
15	Mualifu, Ahmad Guspul, Heermawan (2019)	Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemernitah desa dalam mengelola Alokasi dana desa di	Variabel bebas: transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi Variabel terikat: Akuntabilitas pemernitah desa dalam	Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemernitah desa dalam mengelola Alokasi dana desa Di kabupaten Donggala

		kabupaten Donggala	mengelola Alokasi dana desa di kabupaten Donggala	
--	--	-----------------------	---	--

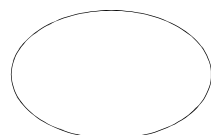
2.6 Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu Kompetensi (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) (Y). Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

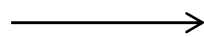


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan Gambar :



: Variabel penelitian



: Garis penghubung

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana,2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dengan berperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₁: Terdapat Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD)

2.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD)

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik (Yesinia.*et al.*, 2018). Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif,

melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian internal (Widyatama dan Novita, 2017).

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Sebagai *steward* pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) dan Yesinia *et al.*, (2018) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₂: Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey, yaitu penelitian ini berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat apakah variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian yang ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan mulai bulan Juni hingga Agustus 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2016:80) mengemukakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Perangkat desa, di 14 Desa pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.3.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2016:81) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun jumlah sampel yang digunakan adalah 100 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu dilakukan secara purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa meliputi. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kaur Pembangunan/Perencanaan, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, dan Kepala Dusun.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

3.4 Deskripsi Responden

Tabel 3.1 Responden Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	100	100
2.	Kuesioner yang kembali	100	100
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
4.	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Adapun karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian berdasarkan jenis kelamin aparaturnya perangkat desa dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Berdasarkan jenis kelamin

Kategori	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
A	Laki-laki	67	67%
B	Perempuan	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Dari tabel 3.2 diatas, karakteristik responden aparatur perangkat desa berdasarkan jenis kelamin diketahui sebagian besar adalah laki-laki sebesar 67%, sedangkan untuk perempuan sebesar 33%

3.4.2 Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan

Penelitian berdasarkan jenjang pendidikan aparatur perangkat desa dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Berdasarkan jenjang pendidikan

Kategori	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
A	SD	0	0%
B	SMP	0	0%
C	SMA	73	73%
D	S1	27	27%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Dari tabel 3.3 diatas, karakteristik responden aparatur perangkat desa berdasarkan jenjang pendidikan diketahui SMA sebesar 73% sedangkan S1 sebesar 27%

3.4.3 Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Penelitian berdasarkan masa kerja aparatur perangkat desa dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Berdasarkan masa kerja

Kategori	Masa kerja	Jumlah Kuesioner	Persentase
A	Di bawah 1 tahun	0	0%
B	Di atas 1 tahun	100	100%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.4 diatas maka jumlah responden yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan yaitu diatas 1 tahun adalah 100%.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data di bagi menjadi dua macam yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menggunakan menggunakan data kuantitatif.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data secara umum ada dua macam yaitu sumber primer dan sekunder. Dari penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan memberikan pernyataan di dalam kuesioner.

3.6 Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik survei yaitu dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.7.1 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diteliti yaitu kompetensi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai variabel terikat.

3.7.2 Definisi Operasional

1. Kompetensi

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Indikator kompetensi aparatur meliputi pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan dan kesopanan.

2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Indikator dalam variabel ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.

3.3.2 Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Indikator dalam variabel ini adalah kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, ketepatan penyampaian laporan.

3.8 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu, (1) Kompetensi, (2) Sistem pengendalian internal dan (3) variabel Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelolah alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dari ketiga variabel tersebut jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh dengan menggunakan instrumen (Angket). Ketiga instrumen yang digunakan dikonstruksi sendiri berdasarkan indikator variabel masing-masing, dengan menggunakan skala likert dimana telah di modifikasi menjadi empat pilihan jawaban yaitu:

Sangat Setuju (SS)	: Skor 5
Setuju (S)	: Skor 4
Netral (N)	: Skor 3
Kurang Setuju (KS)	: Skor 2
Tidak Setuju (TS)	: Skor 1

3.9 Analisis Data

Analisis ini menjelaskan tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 100 responden sebagai sampel penelitian.

Sampel atau responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari aparat desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Malangke. Adapun pengambilan sampel yaitu berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan, Karakteristik sampel yaitu

perangkat desa, tingkat pendidikan terakhir minimal SMA dan masa kerja minimal 1 tahun.

3.9.1 Analisis deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Iqbal Hasan (2001) menjelaskan bahwa statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

3.9.2 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dari hasil validitas didapatkan tiga variabel, yaitu kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan akuntabilitas (Y). Nilai korelasi dibandingkan dengan r_{tabel} dicari pada signifikan 0,5 dengan $(n) = 100$, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,195

Tabel 3.5 Hasil uji validitas

Variabel	No. soal	Validitas	Keterangan
Kompetensi	Pernyataan 1	0,665	Valid
	Pernyataan 2	0,839	Valid
	Pernyataan 3	0,823	Valid
	Pernyataan 4	0,769	Valid
	Pernyataan 5	0,734	Valid
	Pernyataan 6	0,426	Valid
	Pernyataan 1	0,299	Valid

Sistem Pengendalian Internal	Pernyataan 2	0,475	Valid
	Pernyataan 3	0,288	Valid
	Pernyataan4	0,360	Valid
	Pernyataan5	0,270	Valid
	Pernyataan 6	0.488	Valid
	Pernyataan 7	0,508	Valid
	Pernyataan 8	0,412	Valid
	Pernyataan 9	0,431	Valid
	Pernyataan 10	0,265	Valid
	Akuntabilitas	Pernyataan 1	0,712
Pernyataan 2		0,796	Valid
Pernyataan 3		0,852	Valid
Pernyataan 4		0,792	Valid
Pernyataan 5		0,683	Valid
Pernyataan6		0,678	Valid

Data primer yang diolah tahun 2020

Dari tabel di atas untuk semua variabel yaitu variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,195 maka dinyatakan valid.

3.9.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Menurut Sugiono (2016) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Koefisien reliabilitas variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas dengan jumlah 22 butir pernyataan sebesar 0,894, hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas > 0.6 maka dinyatakan reliabel. Dapat dilihat pada lampiran uji reliabilitas.

3.10 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi berganda pada hipotesis penelitian maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, diantaranya

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Berdasarkan hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* nilai *test statistic* sebesar 1,139 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data dinyatakan memenuhi syarat asumsi normalitas, dapat dilihat apada lampiran uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

3.10.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolonearitas akan terlihat semakin jelas dengan semakin kuatnya korelasi antara dua atau lebih

variabel-variabel independen. Sehingga koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error disetiap koefisien regresi akan meningkat menjadi tak terhingga.

Adapun cara mendeteksi ada tidaknya hubungan multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat adalah dengan melihat *Tolerance Value* atau *Variance Inflation* Faktor (VIF). Jika $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas, sedangkan jika $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas,

Pada lampiran hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan hasil $VIF 1,179 < 10,00$

3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau menggunakan metode *Glejset*.

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikan harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Jika koefisien signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Pada lampiran uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Glejset* sangat jelas bahwa nilai signifikan untuk variabel kompetensi sebesar 0,00, sehingga terjadi heteroskedastisitas karena < dari 0,05. sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,662 tidak terjadi Heteroskedastisitas karena > dari 0,05

3.11 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.11.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji adanya pengaruh kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) (Y) pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Analisis ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk menggambarkan seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara umum persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 13,206 + 0,484X_1 + 0,019X_2$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD)

a = 13,206

$$b_1 = 0,484$$

$$b_2 = 0,019$$

$$X_1 = \text{Kompetensi}$$

$$X_2 = \text{Sistem Pengendalian Internal}$$

$$e = \text{Eror}$$

3.11.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Diketahui R Square sebesar 0,306 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada lampiran uji koefisien determinasi (R^2)

3.11.3 Uji Statistik F

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini melalui uji F. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Kriteria pengujian adalah apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan

kata lain variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.

Diketahui nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 21,387 > F_{tabel} 3,94$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y . dapat dilihat pada lampiran uji F

3.11.4 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t juga dilihat dari tabel "*Coefficient*".

Pada hasil hipotesis diketahui bahwa hipotesis pertama pada variabel kompetensi (X_1) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas karena $t_{hitung} = 5,838 > t_{tabel} = 1,660$ dengan signifikan $0,00 < 0,05$, sedangkan Hipotesis yang kedua untuk variabel sistem pengendalian internal (X_2) tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas karena $t_{hitung} = 0,439 < t_{tabel} = 1,660$ dengan signifikan $0,662 > 0,05$. Dapat dilihat pada lampiran uji parsial atau uji t

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Malangke mempunyai luas wilayah $\pm 229,70 \text{ km}^2$ yang terbagi menurut pemanfaatannya yaitu terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah pekarangan, tanah pertambakan dan untuk sarana umum (pemerintah dan olah raga) dan lain-lain.

Kecamatan Malangke berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara: Kecamatan Mappideceng dan Kecamatan Sukamaju
- b) Sebelah Timur: Kecamatan Bone-Bone dan Teluk Bone
- c) Sebelah Selatan: Laut/Teluk Bone
- d) Sebelah Barat: Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Baebunta

Pada Kecamatan Malangke terdapat 14 desa yang dijadikan sebagai sampel. Data yang diperoleh melalui keusioner yang telah disebarakan kepada responden penelitian, yaitu aparatur perangkat desa. Dari 14 desa yang dijadikan sampel yaitu Desa Malangke, Desa Pattimang, Desa Benteng, Desa Tolada, Desa Salekoe, Desa Tingkara, Desa Ladongi, Desa Takkalala, Desa Tandung, Desa Pute Mata, Desa Tokke, Desa Giri Kusuma, Desa Pettalandung, dan Desa Pince Pute.

4.2 Deskripsi Statistik

4.2.1 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable apabila memiliki *croanbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas

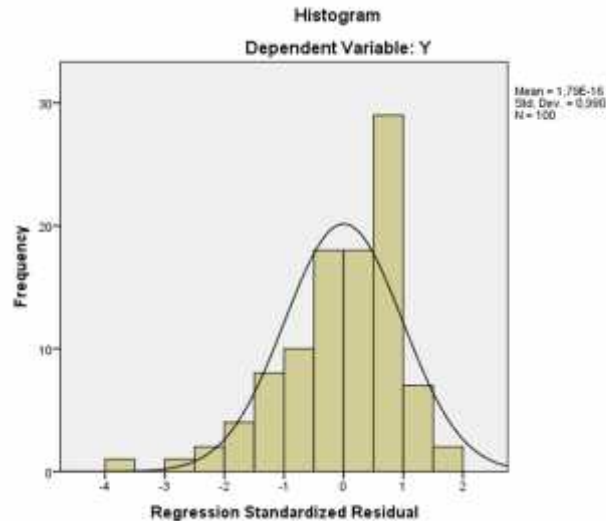
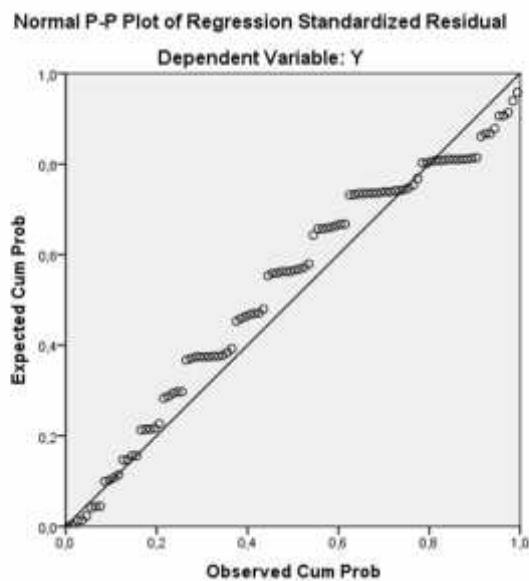
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,894	22

Sumber: Output SPSS Ver.20.

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas dengan jumlah 22 bulir pernyataan sebesar 0,894, hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas > 0.6 maka dinyatakan reliable.

4.2.2 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan dua kali uji normalitas, yaitu dengan menganalisis grafik dan uji statistic. Grafik yang dihasilkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas**Gambar 4.2** Grafik Normal Plot

Dengan grafik histogram dan grafik normal plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal dan berbentuk seperti lonceng, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal dan penyebarannya tidak terlalu jauh sehingga tidak menyalahi asumsi normalitas. Adapun uji statistik dapat dilihat pada hasil uji

dengan menggunakan uji statistik *non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* berikut:

Tabel 4.2 One-sampel Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,06439327
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,094
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		1,139
Asymp. Sig. (2-tailed)		,149

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS Ver.20.

Berdasarkan hasil uji tersebut nilai test statistic sebesar 1,139 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data dinyatakan memenuhi syarat asumsi normalitas.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel bebas yang digunakan saling terkait dalam satu model regresi. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai VIF (*Variant information factor*), jika $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dan apabila $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,206	2,330		5,667	,000		
	KOMPETE NSI	,484	,083	,536	5,838	,000	,848	1,179
	SPI	,019	,044	,040	,439	,662	,848	1,179

a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Output SPSS Ver.20.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan hasil VIF $1,179 < 10,00$

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan menggunakan metode *Glejset* dengan ketentuan apabila nilai sig $> 0,05$ maka tidak terjadi Heteroskedastisitas dan apabila sig $< 0,05$ maka terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13.206	2.330		5.667	.000	
	KOMPETENSI	.484	.083	.536	5.838	.000	
	SPI	.019	.044	.040	.439	.662	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Output SPSS Ver.20.

Dari uji *glejser* diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai signifikan untuk variabel kompetensi sebesar 0.00, sehingga terjadi Heteroskedastisitas karena < dari 0,05. sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,662 tidak terjadi Heteroskedastisitas karena > dari 0,05

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Hasil Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.206	2.330		5.667	.000
1 KOMPETENSI	.484	.083	.536	5.838	.000
SPI	.019	.044	.040	.439	.662

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS Ver.20.

Dari tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara kompetensi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD), sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,206 + 0,484X_1 + 0,019X_2 + e$$

Diketahui :

Y = Akuntabilitas Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa(ADD)

X₁ = Kompetensi

X₂ = Sistem Pengendalian Internal

a = 13,206 apabila kompetensi, dan sistem pengendalian internal dalam keadaan konstan atau 0 maka akuntabilitas nilainya sebesar 13,206.

$b_1 = 0,484$ adalah besarnya koefisien regresi X_1 (kompetensi) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,484 atau 48,4%. Jika variabel kompetensi meningkat maka akuntabilitas akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

$b_2 = 0,019$ adalah besarnya koefisien regresi X_2 (sistem pengendalian internal) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,019 atau 1,9%. Jika variabel sistem pengendalian internal meningkat maka akuntabilitas akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

4.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya kemampuan kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam menjelaskan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) dilihat dari hasil berikut ini:

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,292	2,086

a. Predictors: (Constant), SPI, KOMPETENSI

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS Ver.20.

Berdasarkan data diatas diketahui R Square sebesar 0,306, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y

adalah sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2.7 Uji Statistik F

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	186,050	2	93,025	21,387	,000 ^b
	Residual	421,910	97	4,350		
	Total	607,960	99			

Output SPSS Ver.20.

Dari tabel tersebut diketahui nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} $21,387 > F_{tabel}$ 3.94 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD

4.2.8 Uji t (uji parsial)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)

Tabel 4.8 Uji Parsial

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.206	2.330		5.667	.000
1 KOMPETENSI	.484	.083	.536	5.838	.000
SPI	.019	.044	.040	.439	.662

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Output SPSS Ver.20.

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa:

1. Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel kompetensi (X_1) $t_{hitung} = 5,838 > t_{tabel} = 1,660$ dengan signifikan $0,00 < 0,05$ artinya kompetensi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
2. Hipotesis yang kedua untuk variabel sistem pengendalian internal (X_2) $t_{hitung} = 0,439 < t_{tabel} = 1,660$ dan signifikan $0,662 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas.

4.3 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden, untuk memberikan informasi terkait pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 100 responden dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ semua. Kemudian hasil reliabilitas pada penelitian ini pun reliable yaitu dibuktikan dengan semua koefisien lebih besar dari 0,60 maka semua pernyataan dinyatakan reliable.

Uji R (Koefisien Determinasi) pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam menjelaskan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) ini dapat diketahui dari nilai R Square sebesar 0,306 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 30,6% sedangkan 69,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa $Y = 13,206 + 0,484X_1 + 0,019X_2$ dengan nilai konstan sebesar 13,206. Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa ada pengaruh simultan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y dengan nilai $\text{sig } 0,00 < 0,05$ dengan nilai $F_{\text{hitung}} 21,387 > F_{\text{tabel}} 3,94$. Hasil analisis uji t berdasarkan hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel kompetensi (X_1) $t_{\text{hitung}} = 5,838 > t_{\text{tabel}} = 1,660$ dengan signifikan $0,00 < 0,05$ artinya kompetensi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD), sedangkan hipotesis yang kedua untuk variabel sistem pengendalian internal (X_2) $t_{\text{hitung}} = 0,439 < t_{\text{tabel}} = 1,660$ dan signifikan $0,662 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)

4.3.1 Pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)

Hipotesis yang pertama untuk variabel kompetensi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,838 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,660 dengan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 .

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas karena kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Semakin banyak perangkat desa yang kompeten dalam bidangnya maka tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan akan menghasilkan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Didukung oleh penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dengan beroperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Didukung oleh penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang berarti semakin banyak perangkat desa yang memiliki

kompetensi dalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa.

Namun tidak sejalan pada penelitian Widyatama (2017) bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dan penelitian Perdana (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pemerintah desa tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Karena kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

4.3.2 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)

Hipotesis yang kedua untuk variabel sistem pengendalian internal tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Karena dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 0,439 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,660 dengan signifikan 0,662 lebih besar dari 0,05. Yang berarti sistem pengendalian internal belum baik dan belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. Sistem pengendalian internal diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dan desa periode berikutnya. Sebagai *steward* pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal

agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Didukung oleh penelitian Abubakar *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD, Itu berarti sistem pengendalian internalnya masih tergolong lemah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner yang menjelaskan bahwa tidak semua aparat paham akan pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola (ADD).

Namun tidak sejalan pada penelitian Rosyidi (2018), dan Novita (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. Yang berarti semakin tinggi pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa $Y = 13,206 + 0,484X_1 + 0,19X_2$ dengan nilai konstan sebesar 13,206.
2. $a = 13,206$ apabila kompetensi, dan sistem pengendalian internal dalam keadaan konstan atau 0 maka akuntabilitas nilainya sebesar 13,206.
3. $b_1 = 0,484$ adalah besarnya koefisien regresi X_1 (kompetensi) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,484 atau 48,4%. Jika variabel kompetensi meningkat maka akuntabilitas akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.
4. $b_2 = 0,19$ adalah besarnya koefisien regresi X_2 (sistem pengendalian internal) yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,19 atau 1,9%. Jika variabel sistem pengendalian internal meningkat maka akuntabilitas akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.
5. R Square sebesar 0,306, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

6. Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa ada pengaruh simultan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y dengan nilai sig $0,00 < 0,05$ dengan nilai $F_{hitung} 21,387 > F_{tabel} 3.94$.
7. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel kompetensi (X_1) $t_{hitung} = 5,838 > t_{tabel} = 1.660$ dengan signifikan $0,00 < 0,05$ artinya kompetensi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
8. Dari hasil analisis untuk variabel sistem pengendalian internal (X_2) $t_{hitung} = 0,439 < t_{tabel} = 1.660$ dan signifikan $0,662 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparat pengelola dana desa dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar program-program desa bisa terealisasikan dengan bantuan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya, di harapkan dapat menambah variabel penelitian seperti pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan masyarakat yang akan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) yang mana belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010.

A. Subroto, 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)," *Progr. Stud. Magister Sains Akunt. Progr. Pasca Sarj. Univ. Diponegoro Semarang*, pp. 1–109.

Abdi, N., & Wahid, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 66-81.

Aikins, S. (2011) An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*: 306-337.

Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(3), 2339-0492.

Donaldson, & Davis, J. H. 1991. *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management*, 16: 49-64.

Ghozali , I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafiz, M., Rasuli, M., & Kurnia, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Doctoral dissertation). *Skripsi*, Riau University.

Indah Mudarosatun, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2).

- Komarasari, W. (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Prodi Akuntansi UPY*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL",8(2)*.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: ANDI*.
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe), 1(1), 49-59*.
- Moehersono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya : Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tetang Desa.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi, 5(2)*.
- Rismawati, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertatio). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Renggo, B. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation). *Skripsi, Politeknik Negeri Sriwijaya*.

- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-14.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).
- Yudianto and E. Sugiarti. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang), *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–18
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.